

INDUSTRI & PERDAGANGAN

2019, Rapor Peternak Unggas Merah

NERACA

Jakarta - Tahun 2019 merupakan tahun tersulit bagi usaha budidaya ayam broiler. Tercatat selama tahun 2019 peternak rakyat mandiri melakukan lima kali demonstrasi damai untuk menyampaikan tuntutan keberpihakan kelangsungan usaha budidaya bagi peternak mandiri.

Pengurus Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN), Alvino Antonio mengaku bahwa dalam kurun waktu 1 tahun ini selama 10 bulan harga ayam hidup (live bird) terjebak jatuh dibawah harga pokok produksi (HPP) peternak. Dengan harga terparah menyentuh harga 5.000 per kg di bulan Juni lalu. Sementara harga di level HPP peternak hanya terjadi dalam 2 bulan.

"Jadi memang selama 1 tahun ini seakan tidak ada perbaikan tata niaga perdagangan nasional yang cukup signifikan. Peternak rakyat mandiri seakan berjuang sendiri untuk usaha budidayanya.

Sementara sebagian peternak rakyat mandiri yang tidak tahan dengan kondisi ini mengambil keputusan untuk menyudahi usaha budidayanya," keluh Alvino dalam keterangan tertulis yang dikirimkan NERACA.

Melihat hal ini Alvino mempertanyakan, apakah kondisi peternak rakyat mandiri ini harus terus terjadi untuk waktu - waktu kedepan? Sementara me-

nurut peraturan perundang-undangan peternak rakyat mandiri merupakan "ekosistem" yang juga harus tetap dipertahankan. Muara semua kejadian hancur leburnya harga LB selama tahun 2019 tidak lain dan tidak bukan adalah terjadinya kondisi oversupply yang tidak dapat terselesaikan dengan baik dan komprehensif. Upaya yang dilakukan hanya berupa pengurangan produksi Day Old Chick (DOC) yang terkandung menimbulkan masalah baru yakni tingginya harga DOC sementara kepastian harga jual LB diatas HPP peternak tidak pernah terjadi.

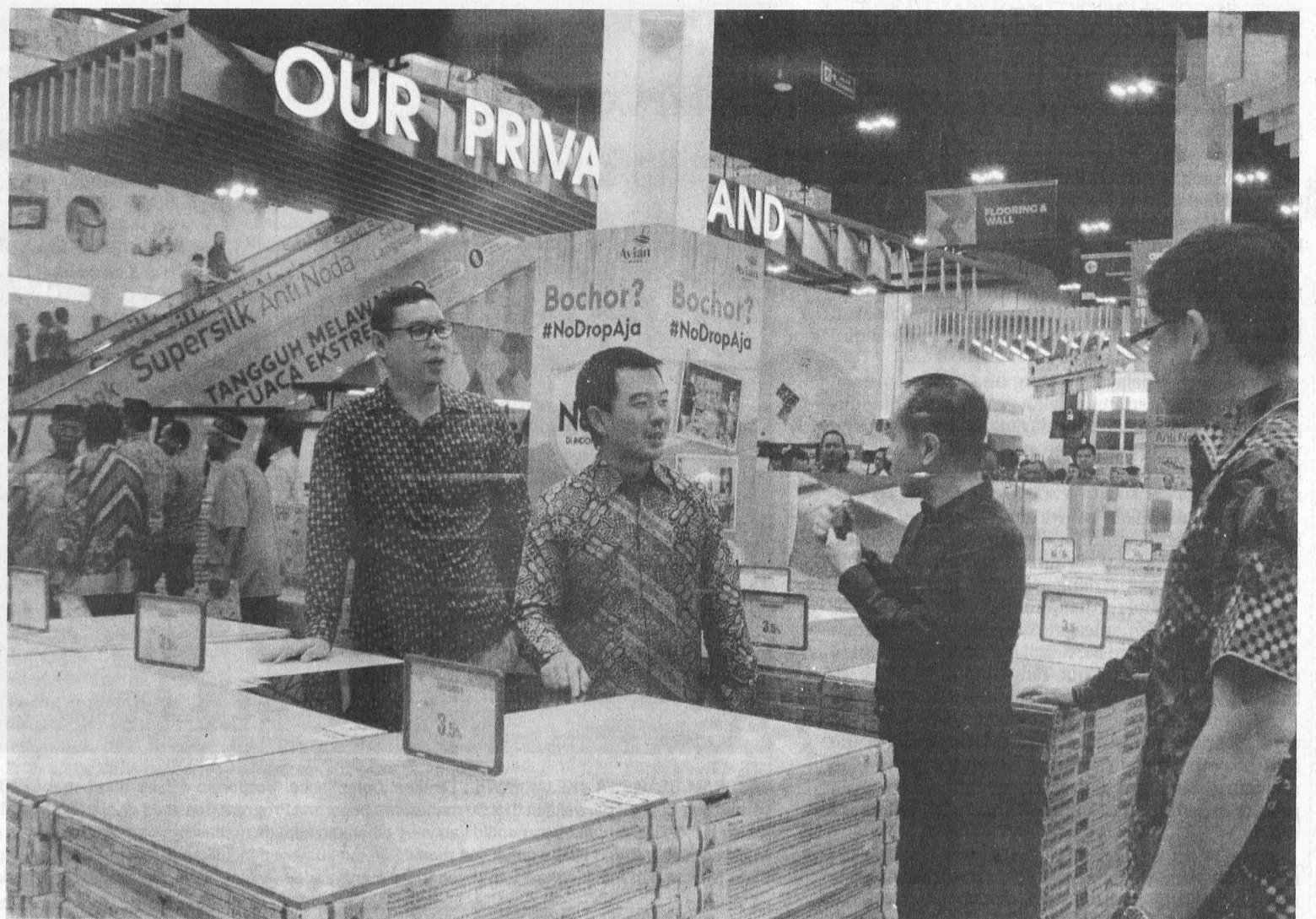
"Kondisi ini diperberat dengan tingginya harga pakan ternak yang terus stabil dilevel harga 6.800 - 7.200/kg yang sudah pasti akan menambah beban HPP peternak," keluh Alvino. Terbukti, berdasarkan catatan PPRN kejadian demi kejadian ini menggambar kondisi "rapor merah" perunggasan nasional 2019" yang diantaranya, pertama meruginya peternak rakyat mandiri selama 10 bulan sebesar kurang lebih 2 Triliun rupiah.

Kedua, anjloknya harga ayam hidup selama 10 bulan, akibat data yang tidak akurat menyebabkan kondisi oversupply. Ketiga, tingginya harga DOC dan pakan. "Keempat, mandulnya" peraturan perundangan dalam perlindungan usaha peternak rakyat mandiri, serta tidak terciptanya iklim usaha yang sehat," risau Alvino.

Melihat hal tersebut Alvino menyarankan ada rumusan terhadap "rapor merah" perunggasan "nasional 2019" tersebut. Pertama, Turunkan harga DOC maksimal 5.000/ekor dan turunkan harga pakan maksimal 6.500/kg. Kedua, menjaga kestabilan harga ayam hidup diatas HPP peternak sesuai dengan harga referensi yang tercantum didalam Perendang 96 Tahun 2018.

Ketiga, memperbaiki akurasi data supply DOC. Keempat, menuntut pengurangan DOC FS broiler 10 juta per pekan dengan pengawasan ketat dan diumumkan secara terbuka. Kelima, transparansi informasi data alokasi dan distribusi GPS, PS dan telur non HE yang mudah diakses semua pihak.

Keenam, memviesi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No 18 Tahun 2009 jo UU No 41 Tahun 2014. Terakhir, pemerintah yang berhasil adalah Pemerintah yang bisa menciptakan sejuta UMKM Peternak baru. Bukan seperti Pemerintah saat ini yang hanya membesarkan 12 konglomerasi dan membiarkan Peternak UMKM bangkrut mati karena perang harga para raksasa konglomerat," harap Alvino. Padahal sebelumnya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan, Kementerian Pertanian (Kementan) Hewan I Ketut Diarmita menyebutkan volume ekspor peternakan pada 2018 sebesar USD 640,17 juta setara Rp. 9,05 triliun. ● groho



PERESMIAN MITRA10 KE-34 : kiri ke kanan, Direktur Mitra10 Indra Gunawan, Presiden Direktur Mitra10 Andy Totong, Wakil Presiden Direktur PT Avia Avian Ruslan Tanoko dan Perwakilan SCG Group Thailand Warit Jintanawan berbincang usai meresmikan superstore Mitra10 ke-34, di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/10). PT Catur Sentosa Adiprana Tbk selaku pemilik dari jaringan ritel modern bahan bangunan dan home improvement Mitra10, telah menuntaskan rencana pembukaan lima gerai baru sepanjang 2019 yang tersebar di Kota Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, Makassar dan Solo. Ekspansi agresif ini bagian dari rencana Perseroan untuk memiliki 50 gerai Mitra10 pada 2021 mendatang.

Produk Lokal Menggerakkan Sektor UMKM

Yogyakarta - Indonesia dikenal sebagai negara kaya penghasil pangan lokal dengan keanekaragaman sumber pangan yang sangat besar. Namun ternyata dengan menggunakan produk lokal justru dapat menggerakkan unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

NERACA

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengajak masyarakat untuk mencintai pangan lokal melalui gelaran acara pangan lokal berbasis UMKM di Benteng Vredenburg Yogyakarta. Lebih dari 4000 masyarakat dan pelaku UMKM hadir dan mendukung gerakan ini.

"Ini penting, tidak hanya sehat dan bergizi, tapi juga pangan lokal juga penting dalam memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat, dan didalamnya ada peran UMKM yang sangat besar dalam mewujudkan pola pangan impian tersebut.

"Ini bukan hanya program pemerintah, ini adalah gerakan bersama, bukan hanya Kementerian Pertanian, atau Kementerian Koperasi, ini urusan rakyat, urusan kita semua, semua bisa jalan apabila ada kebersamaan diantara kita, termasuk UMKM yang kita ketahui memiliki ketahanan usaha yang luar biasa, dan salah satu penopang perekonomian bangsa" ungkap Syahrul.

Lebih lanjut, Syahrul mengungkapkan pangan lokal merupakan bagian dari budaya, dan budayanya tersebut harus dijaga dan ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya secara masif, dan gerakan itu harus dimulai dari diri sendiri.

"Kita harus membiasakan diri mengkonsumsi pola makan yang sehat dan

hanya berpikir bagaimana mewujudkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga menciptakan produk-produk ekspor yang mampu berkompetisi atau bersaing dengan negara-negara lain dalam memperlebarkan pasar dunia," harap Syahrul.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana X, mengatakan pangan sebagai kebutuhan dasar sangat menentukan kelangsungan hidup rakyat, ketidakkucupan pangan berpotensi mengguncang stabilitas sosial dan ketahanan nasional.

"Kenyataan ini menunjukkan bahwa pangan merupakan hal yang sangat strategis, karena menjadi penentu ketahanan keamanan sosial dan politik negara, tidak mengherankan jika pangan menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi di semua negara, pangan juga merupakan hak asasi" terang Sri Sultan.

Melihat hal tersebut Sri Sultan berharap, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen, dan berkontribusi menyediakan bahan pangan yang cukup bagi rakyat, kegiatan ketahanan pangan hendaknya dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, misalnya dengan mendorong terwujudnya desa mandiri pangan, penanaman desa rawan pangan, keanekaragaman pangan berbasis pangan lokal, dan peningkatan kemandirian pangan. "Dalam kerangka itu, lahirlah DIY menerapkan program aksi penganekaragaman pangan lokal, penguatan kedaulatan pangan melalui gelar pangan lokal berbasis UMKM pada hari ini, kedepan perlu dilakukan intensifikasi pertanian," terang Sri Sultan. ● groho



PEGOLF RORY HIE BERLAGA DI BNI INDONESIAN MASTERS : Pegolf Indonesia Rory Hie melakukan pukulan tee off pada turnamen BNI Indonesian Masters 2019 di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rory Hie yang pernah menjuarai Asian Tour di ajang Classic Golf and Country Club International Championship 2019 di India ini menjadi pemain unggulan Indonesia di turnamen tersebut.

KKP Menggenjot Devisa melalui Ekspor Benih Lobster

NERACA

Jakarta - Demi menggenjot devisa negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan ekspor benih lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo mengaku berencana akan ekspor benih lobster. "Ini kan masih dalam taraf wacana. Dan nanti akan kami putuskan berdasarkan hitungan. Saya sendiri kalau bisa memutuskan sendiri, saya siap kok untuk diekspor," terang Edhy.

Sebab, Edhy mengakui bahwa dengan mengeksport benih tersebut maka akan meningkatkan pendapatan negara melalui devisa, dan ini juga akan menggerakkan ekspor benih lobster.

"Jadi ini bukan kepentingan pribadi. Devisa negara yang akan muncul, rakyat yang tadinya tergantung bisa hidup lagi," harap Edhy.

Lebih lanjut, menurut Edhy, tidak bisa semuanya ngotot melarang ekspor benih lobster melihat atas dasar lingkungan. Sebab pihaknya pun sadar akan pentingnya merawat dan

menjaga lingkungan termasuk kawasan laut dan sekitarnya.

Artinya jika nanti ada masalah kekurangan benih lobster di alam, maka pihaknya akan mengajukan rakayat. "Jadi ini bukan kepentingan pribadi. Devisa negara yang akan muncul, rakyat yang tadinya tergantung bisa hidup lagi," harap Edhy.

Berarti kan sudah ada 4 kali jumlah anak di alam. Tapi kan ini akan ada perdebatan lagi, makanya saya tidak mau. Ya kalau ujungnya saya ambil risiko saya akan ambil, tak masalah. ● groho

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPH Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.03/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.10/2015 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, PT Precious NINE Consulting, NPWP No: 02.978.922.9-063.000 dan beralamat di Cyber 2 Tower Lantai 18, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13, Jakarta 12950, dengan ini mengumumkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tahun buku 2019 sebesar Rp61.735.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Nama Debitur	NPWP	Alamat	Nilai Piutang Tidak Tertagih (Rupiah)
BUT Caelus Energy Mangkallih Pte Ltd	02.410.396.2.081.000	Gedung Cyber 2 Tower Lt. 27, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950	9.155.000
Adiyanto Sumardjono	07.299.202.7-432.000	Kemang Pratama Regency L-9, Bojong Rawa Lumbu, Bekasi Jawa Barat	13.530.000
PT Investasi Film Indonesia	02.289.848.0-019.000	Grand Wijaya Blok H 12B Lt. 3, Jl. Wijaya II, Pulo, Jakarta Selatan 12160	22.000.000
PT LNG Easy Batam	75.498.835.0-225.000	Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok M No. 3, Batam Centre, Sukajadi, Batam, Riau	17.050.000
Jumlah			61.735.000

Rincian Daftar Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercantum pada pembukuan perusahaan yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dan daftar tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Setiabuadi Empat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 sebagai lampiran.

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015, maka bersama ini diumumkan bahwa PT Transpacific Finance telah menghapusbukukan piutang Debitur sebagai berikut:

- Mulyadi
- Hidayat
- Usup Suhendi
- Nurhayati
- Masruki
- Almas
- Andi
- Tiara Gunawan
- Rudiansyah
- Dedy Salsendy
- Haidin
- Sari
- Agung Nugroho
- Dan Komarudin
- Almas Hari Rianan
- Uman
- Tiara Gunawan
- Nani Suryani
- Nova Laila Ratuliyana
- Agung Riadi
- Anggrani
- Rusti Eleni
- Hen Kuthendar
- Mesike Anna Sarah Malinda
- Fajrah
- Ade Fabian
- Anir
- Mudrisa Hilmah
- Ogi Dani
- Anton Sukand
- Resti Singih
- Yuli Rizki
- Asep Irfan Saefuddin
- Hery Kusuman
- The Said Karamand
- Roni Pratiha
- Dedi Ruanani
- Nina Sopiana
- Ilhamyanti
- Andriyanti
- Anton Subarsono
- Mohamad Arifin
- Edi
- AJ
- Nehal
- Ean Nengih
- Nurdiya
- Cach
- Imas Rani
- Dani
- Mitar
- Rony
- Mohamad Syarif Anwar
- Siti Mulyati
- Amal
- Tunah
- Nurfarida
- Ajat
- Sally Amelia
- Raden Wilwan Suryawan
- Joesly Gunawan
- Siti Juwita
- Kelana Wijaya
- Suryana
- Jeffa Edwina Boundard De Haan
- Karwati
- Aan
- Zaver Hamid
- Kosasih
- Rian Ardiansyah
- Ai Rika Kartika
- Nehal
- Obor Sobarna
- Yedy Nengsih
- Ade Nuzula
- Ujang Nurul
- Mohamad Arifin Aminda
- Rosita Roy Oktaviana
- Moh Komarudin
- Andri Lesmana
- Devi Amnah
- Hendri Anwar Fadhlan
- Feri Rahman
- Sajono
- Eli Gueyeni
- Monsila
- Erwan
- Armad Purwono
- Agus Gunawan
- Devi Sotana
- Mohamad Hermanto
- Sunanta
- Mam Bin Ali
- Suryana
- Herwati
- Fatih Rahmi
- Rudiansyah
- Taufik Subratri
- Agus Gunawan
- Suryadi
- Munair Sazdali
- Suhi
- Uci
- Abdul Aziz
- Subudin
- Dadang Wijaya
- Widani
- Widani
- Roid
- Agus Setiadi
- Hilal Samudun
- Abdul Aziz Idris
- Nuraim
- Devi Rahmayanti Indra
- Yedy Nengsih
- Yono
- Iman Wardiman
- Tita Rosmah
- Almas
- Yandri Yudianty
- Naning
- Lina Helina
- Saryana
- Dadang Supardi
- Musa Abdul Rachman
- Nurdiya Anwar Fadhlan
- Ria Iyayani
- Denny Mustikarini Mokodsopit
- Saryana
- Iman Firmansyah
- Konkolek
- Hendri
- Endang Yul Kartini
- Amad
- Rini Bayuni
- Erni
- Rangga Alamsyah
- Suyati
- Gumawan
- Hendra
- Maup
- Mahidin Sirag
- Mahmur

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk

Bersama ini Direksi PT Berkah Prima Perkasa Tbk ("Perseroan"), mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin 6 Januari 2020
Waktu : 09.00-Selesai
Tempat : Seminar Room Lt.1 Bursa Efek Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

- Penetapan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- Penentuan Susunan Pengusung

Catatan:

- Panggilan ini berlaku sebagai undangan, untuk RUPS di atas Direksi/Perseroan tidak mengimprimi undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
- Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat-Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penitipan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 12 Desember 2019 sampai pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.
- Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entycom, PT Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, 10220. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari 2019.
- Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat-Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
- Bahan-bahan Rapat, telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.blueprint-indonesia.com mulai tanggal 13 Desember 2019, sampai dengan tanggal RUPS.
- Untuk keterangan Rapat, pemegang saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Desember 2019
PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk
Direksi